

## BPK JAWA TENGAH BERIKAN OPINI WTP ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 2021



Sumber Gambar : <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/pr-043450443/11-kabupatenkota-di-jateng-terima-lhp-atas-lkpd-dari-bpk-jateng-semuanya-wtp>

### Isi Berita:

Jakarta - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan keuangan pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (TA) 2021. Laporan ini disampaikan Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Jateng Ayub Amali yang turut mengapresiasi jajaran Pemprov Jateng. Diketahui, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD TA 2021 Pemprov Jateng. Ayub Amali menyampaikan pemeriksaan keuangan merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK dan tujuan pemeriksaan keuangan ini dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

"Apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jateng yang telah mendukung kelancaran proses pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan pendahuluan hingga penyusunan laporan," ungkap Ayub dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (25/5/2022). Ayub juga memberikan ucapan selamat atas opini WTP ke-sebelas yang berhasil diperoleh Pemerintah Provinsi Jateng. Kendati demikian, ia mengingatkan ada beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jateng. Mulai dari

masalah penatausahaan aset tetap dan penyajian piutang pajak kendaraan bermotor. Untuk itu, Ayub berharap LHP yang disampaikan dapat bermanfaat bagi perbaikan pengelolaan APBD.

Lebih lanjut, Ayub mengungkap pihaknya juga menyampaikan LHP Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Jateng. Serta buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) tahun 2021. IHPD 2021 ini memuat ringkasan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jateng selama tahun 2021 di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai informasi, acara penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 ini digelar dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jateng. Acara ini turut dihadiri oleh para kepala sub auditorat BPK Perwakilan Provinsi Jateng dan tim pemeriksa BPK atas LKPD Provinsi Jateng TA 2021.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6095002/bpk-jateng-berikan-opini-wtp-atas-laporan-keuangan-pemprov-jateng-2021>, tanggal 25 Mei 2022
2. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6095164/pemprov-jateng-raih-wtp-lagi-ganjar-bukan-berarti-kita-asyik-asyik-aja>, tanggal 25 Mei 2022

#### **Catatan :**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
  - b. Pasal 2
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
    - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
  - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*